

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia politik internasional dalam perkembangannya selalu terisi dengan konflik. Ini adalah fakta, dan sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa konflik adalah bagian dari sejarah interaksi manusia, baik mereka konflik internal dalam negara atau konflik internasional antar negara. Secara umum, konflik adalah hasil dari kebutuhan, nilai, dan kepentingan yang berlawanan, terlepas dari apakah benar-benar aktual atau hanya dirasakan, yang terjadi di antara para pihak yang terlibat. Bernard Mayer dengan tepat menyatakan bahwa konflik muncul:

*".. dari persaingan untuk sumber daya dan kekuasaan, dari struktur masyarakat dan lembaga yang dibuat orang, dari perjuangan tak terelakkan antara kelas."*¹

Salah satu konflik internasional yang telah berlangsung lama adalah krisis antara Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara negara tertentu ini pertama kali muncul pada tanggal 25 Juni 1950, yang tidak hanya melibatkan dua negara (*state*) yang bertentangan, tetapi juga komunitas global. Intervensi internasional pun telah menjadi bagian dari konflik ini. Korea Utara menerima dukungan dari Republik Rakyat Cina (RRC) dan bekas Uni Soviet (Persatuan Republik Sosialis Soviet (*Union of Soviet Socialist Republics – USSR*)), sementara Korea Selatan menerima

¹ Bernard Mayer, "The Dynamics of Conflict Resolution: A Practitioner's Guide", John Wiley & Sons, New Jersey, 2010.

dukungan dari Amerika Serikat (AS), Inggris (Britania Raya), Belanda, Belgia, Perancis, Kanada, dan Australia, antara lain.

Konflik ini menjadi masalah yang sangat serius ketika pengerahan militer dilakukan dalam jumlah besar dan peralatan yang signifikan. Di antaranya adalah gabungan personel militer dari tentara, angkatan laut, dan angkatan udara dari Korea Utara dan Korea Selatan yang hanya di awal sudah berjumlah sekitar 231.000 pasukan, puluhan unit T34 dan R85 tank tempur utama (*main battle tank – MBT*), lebih dari seratus pesawat tempur Yak dan pesawat pengebom AT-6, dan pesawat mata-mata yang tidak diungkapkan jumlahnya. Konflik ini, yang kemudian berkembang menjadi perang terbuka (konflik bersenjata), memperoleh perhatian internasional yang luas dan ditakutkan akan mengakibatkan korban besar dan penderitaan luas warga sipil dari kedua negara. Hal ini mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan Resolusi PBB nomor 82, 83, 84, dan 85 di tahun 1950.²

Namun, resolusi permanen untuk konflik dengan hasil damai belum tercapai hingga saat thesis ini ditulis (2017). Sejauh ini, gencatan senjata yang labil adalah hasilnya, yang masih menimbulkan banyak potensi kekerasan untuk meletus di daerah, khususnya daerah perbatasan. Meskipun demikian, dalam konflik yang terus berlangsung ini, kedua Korea masih berhasil melakukan beberapa interaksi diplomatik, termasuk:³

- a. Hubungan sosial. Memasuki abad ke-21, intensitas hubungan antara masyarakat dari dua negara telah menunjukkan tren

² “Korean War: History”, dalam <https://www.history.com/topics/korea/korean-war>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

³ Paul M. Edwards, “Historical Dictionary of the Korean War”, Scarecrow Press, Lanham and Toronto, 2010, h. 61.

meningkat. Lebih jauh lagi, menurut sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh British Broadcasting Corporation (BBC), sekitar 78% penduduk Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk melihat wilayah kedua negara mereka sebagai ruang untuk berbagi hidup bersama.

- b. Hubungan budaya. Lebih banyak staf birokratik dan kelas atas Korea Utara mulai menggunakan produk Korea Selatan dan ikon budaya populer, seperti Hyundai, KIA, dan LG. Kedua negara juga berhasil menyepakati beberapa agenda seperti "Spring is Coming" dan kerja sama dalam mengorganisir Olimpiade Musim dingin di Pyeongchang.

Sejak pembagian Semenanjung Korea menjadi dua negara yang terpisah, perkembangan bagian utara cenderung menjadi lebih otoriter. Hal ini dapat diamati dari penerapan konsep Juche atau kemandirian dalam tingkat ekstrem ke dalam ideologi negara. Juche pada intinya adalah kepercayaan diri yang sangat tinggi atau ekstrem dalam melihat kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup – dan berkembang – secara mandiri dan tersendiri tanpa perlu bergantung pada negara lain. Hal lain yang dapat diamati dari otoritarianisme ini adalah perlakuan hampir pendewaan dari pemimpin tertinggi pertama di Korea Utara, Kim Il-sung, bersama dengan putranya, pemimpin tertinggi kedua, Kim Jong-il, dengan cara yang terorganisasi oleh negara, dan pemberian gelar kekal bagi mereka.⁴

Secara politis, Korea Utara mengadopsi sistem partai tunggal. Sistem ini sebenarnya merupakan aliansi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, yaitu Partai Demokrat Sosial Korea dan Partai

⁴ "History of North Korea", dalam <http://www.libertyinnorthkorea.org/learn-north-korea-history/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

Chongu Chondoist. Aliansi ini memastikan kerjasama penuh secara harfiah dari kebanyakan – jika tidak semua – politisi, dan menjaga setiap oposisi, jika ada, pada tingkat terendah, bahkan jika perlu menjadikan para pihak hanya sebagai "stempel persetujuan" dari kebijakan pemerintah. Cara-cara tersebut telah berhasil melegalkan pemerintahan Korea Utara hingga saat ini.

Pasca-1990 (namun pra-abad ke -21), hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan memburuk lebih jauh lagi, terutama di sekitar saat Kim Jong-Il mengambil alih kekuasaan dari ayahnya. Namun, upaya untuk meningkatkan hubungan antara dua "saudara" tersebut terus dibuat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah didirikannya kawasan industri khusus Kaesong.

Kaesong, yang terletak sekitar sepuluh kilometer di sebelah utara Zona Demilitarisasi (*demilitarized zone – DMZ*) di bagian selatan Korea Utara, menjadi tuan rumah kawasan industri Kaesong (*Kaesong Industrial Complex – KIC*). Kawasan ini dikelola bersama oleh Korea Utara dan Korea Selatan dan telah beroperasi sejak Desember 2004. Ini dipandang sebagai bagian dari kebijakan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-il dalam reformasi ekonomi dan "kebijakan sinar matahari" dari Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, dan telah dipuji sebagai era baru interaksi antara kedua negara dalam bentuk kerjasama ekonomi yang damai.⁵

Selama kurun waktu tahun 2010-an, terjadi perkembangan lebih lanjut dalam interaksi ini. Sebagai pemimpin tertinggi ketiga, Kim Jong-un, mengambil alih kepemimpinan Korea Utara pada tahun 2011, di mana hubungan antara kedua negara memasuki sebuah bab baru. Lahir pada 1983, Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi termuda dari ketiga

⁵ "North Korea Snubs South, Restart Kaesong Industrial Park", dalam <http://www.dw.com/en/north-korea-snubs-south-restarts-kaesong-industrial-park/a-40872227>, diakses pada tanggal 2 September 2018.

pemimpin tertinggi Korea Utara pada awal kepemimpinan mereka masing-masing. Dia pada saat itu berusia 28 tahun, sedangkan kakeknya berusia 36 tahun ketika mengambil kekuasaan, dan ayahnya bahkan lebih tua, yaitu berusia 53 tahun. Lahir sebagai anak kedua dari Kim Jong-il dan Ko Yong-hui, ia juga merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi Korea Utara yang lahir setelah berdirinya negara tersebut.⁶

Sebagai pemimpin tertinggi termuda, pernah diperkirakan bahwa kepemimpinannya akan membawa hubungan antara kedua Korea ke situasi yang jauh lebih baik, dan bahwa bahkan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan tidak terlalu jauh dari harapan. Namun, kedua hal ini tidak terjadi. Banyak yang menyatakan bahwa harapan yang tidak berbuah ini adalah akibat dari gaya kepemimpinan Kim Jong-un.

Kim Jong-un pada gilirannya ternyata mempertahankan gaya kepemimpinan otoriter dan bersifat militeristik seperti yang telah dilakukan oleh ayah dan kakeknya. Hal ini telah sangat berhasil dalam memegang kendali tidak hanya dalam populasi sipil dan politik tetapi juga dalam populasi militer. Akibatnya, perubahan kebijakan terhadap reunifikasi dianggap tidak mungkin, kecuali ada sesuatu yang baru yang ditawarkan pada situasi saat ini di mana rezim akan dapat melihat manfaat dari pengabaian gaya kepemimpinan tersebut.

Selain itu, persoalan ini semakin diperburuk oleh konsep Juche yang diadopsi oleh Korea Utara dan rakyatnya. Ini adalah sebuah ideologi di mana kepercayaan diri terhadap kemandirian dibawa ke tingkat ekstrem, yaitu para pengikutnya lebih suka kelaparan atau bahkan mati daripada menerima bantuan atau menerima kasihan dari orang lain dan hal ini dianggap sebagai suatu kebajikan. Dimasukkan ke dalam konteks yang

⁶ “Kim Jong-un: Military Leader, Dictator”, dalam <https://www.biography.com/people/kim-jong-un-21125351>, diakses pada tanggal 5 September 2018.

salah dan dipropagandakan oleh kelas penguasa, ini jelas menambahkan masalah lain dalam upaya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan.

Dari sudut pandang Korea Utara, pemerintahan yang berkuasa memandang negaranya sebagai yang memiliki posisi di atas dalam hal bagaimana reunifikasi dapat terjadi. Hal ini terlihat dalam kepemilikan beberapa faktor kunci bahwa rezim Korea Utara sangat merasa bahwa mereka dibenarkan untuk mendikte sebagian besar – jika bahkan bukan semua – syarat dari reunifikasi secara damai. Jika tidak, reunifikasi dengan kekerasan (menggunakan kekuatan militer) dapat digunakan, seperti halnya pernah dilakukan oleh rezim Korea Utara pada tahun 1950 yang menghasilkan Perang Korea.

Istilah reunifikasi itu sendiri paling sering dikaitkan dengan aspek politiknya. Dengan demikian, hal ini adalah salah satu yang paling tepat terkait pada keadaan di kedua Korea saat ini. Aspek penting lainnya, yaitu aspek kebudayaannya, tidak sepenuhnya berkaitan dengan upaya reunifikasi ini, karena Korea Utara dan Korea Selatan pada dasarnya masih memiliki budaya yang sama.

Reunifikasi adalah kondisi yang ada setelah masyarakat (atau negara) yang terbagi setelah unifikasi sebelumnya bersatu lagi. Unifikasi itu sendiri harus didahului dengan fase yang disebut integrasi, yang dalam kasus negara, disebut sebagai integrasi politik. Fase ini mengintegrasikan semua aspek perbedaan dari mereka yang akan diintegrasikan, seperti masyarakat, kepentingan, budaya, bahasa, latar belakang, dll. Hal ini karena integrasi politik – dan akhirnya, unifikasi – dimulai dengan perbedaan, dan agar hal-hal tersebut dapat terjadi, perlu ada tingkat kompromi atau konsesi tertentu mengenai perbedaan tersebut oleh mereka yang terlibat. Hal ini akan menyebabkan keadaan "Kesatuan" (*state of oneness*) yang terdiri dari perbedaan-perbedaan sebelumnya yang disatukan. Ernst Haas mendefinisikan integrasi politik sebagai proses di

mana bangsa melupakan keinginan dan kemampuan untuk melakukan kebijakan domestik dan penting di dalam negeri secara independen satu sama lain, dan sebaliknya mencari cara untuk membuat keputusan bersama atau untuk mendelegasikan proses pengambilan keputusan ke suatu badan-badan terpusat yang baru.⁷ Ketika proses ini selesai, maka keadaan unifikasi terjadi. Dengan demikian, reunifikasi adalah penerapan ulang proses dan kondisi tersebut, di mana ada perbedaan awal yang mungkin terjadi, dan sekali lagi, dianggap tidak signifikan dalam mengejar tujuan yang lebih besar dan umum. Konsep ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian dari sub-bab kerangka teori.

Oleh karena itu, tesis ini mencoba untuk menjelaskan masalah upaya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan dilihat dari perspektif Korea Utara. Ruang lingkup tesis ini dibatasi untuk membahas mulai tahun 2011 hingga tahun 2017. Ini adalah periode waktu kepemimpinan Kim Jong-un ketika reunifikasi tidak diragukan lagi telah gagal.

Ini juga merupakan periode ketika faktor Korea Utara yang berkontribusi terhadap kegagalan reunifikasi paling menonjol. Tidak pernah sebelumnya rezim otoriter merasa lebih kuat karena ideologi negara mereka Juche dan kemampuan persenjataan nuklir. Dengan mempelajari apa yang menyebabkan kegagalan ini dari perspektif Korea Utara, akan tercipta kemungkinan yang lebih besar untuk memahami apa yang mungkin berhasil, dan ini akan membawa manfaat yang luar biasa untuk kedua Korea yang saat ini tengah terbagi. Sangat menarik untuk melihat apa yang dapat ditemukan dalam upaya yang saat ini gagal dalam reunifikasi dua masyarakat yang pada dasarnya merupakan orang-orang yang sama.

⁷ Nikola L. Ilievski, "The Concept of Political Integration", *Journal of Liberty and International Affairs*, Bitola, 2015, h. 6.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang pada sub-bab sebelumnya, masalah dapat dirumuskan sebagai:

"Mengapa upaya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un sepanjang tahun 2011 – 2017 gagal dari perspektif Korea Utara?"

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh tesis ini memiliki tujuan dan manfaat berikut:

1. Untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam rumusan masalah dan untuk memverifikasi hipotesis kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan di bawah pimpinan Kim Jong-un untuk tahun 2011 – 2017, diambil dari perspektif Korea Utara.
2. Untuk memperoleh wawasan tentang hubungan antara kepemimpinan negara dan pembuatan kebijakan luar negeri, terutama di negara dunia ketiga, dalam berurusan dengan hubungan luar negeri.

1.4. Tinjauan Pustaka

Studi reunifikasi sebagai bagian dari resolusi konflik memang topik yang kurang populer dalam Hubungan Internasional dibandingkan dengan isu-isu yang lebih populer seperti proliferasi senjata nuklir, senjata pemusnah massal (*weapons of mass destruction – WMD*), terorisme, sengketa perbatasan, peran organisasi internasional, keamanan nasional, dll. Salah satu studi tentang reunifikasi sebagai bentuk resolusi konflik adalah yang dilakukan oleh G. Ulferts dalam makalahnya "North Korean

Human Rights Abuses and Their Consequence".⁸ Dia menyarankan bahwa Korea Utara adalah negara yang secara konsisten menolak intervensi dan bantuan kemanusiaan oleh negara-negara Barat. Bahkan hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara masih menganut konsep *Juche* tentang kemandirian yang ekstrem.

Ketaatan yang sangat dalam terhadap gagasan ini terjadi dengan mengorbankan kondisi ekonomi, di mana terjadi kemiskinan pada rakyatnya. Sistem politik tertutup dan kebijakan luar negerinya membuat Korea Utara terisolasi dari mayoritas masyarakat global. Tingkat kemiskinannya terus meningkat dalam basis tahun ke tahun (*year-on-year basis*), yang berada pada kisaran 25%. Kondisi ini semakin diperparah ketika seseorang hanya perlu melihat melintasi perbatasan untuk mengetahui bahwa "saudara dan saudarinya" di Korea Selatan tidak hanya makmur, tetapi bahkan mampu berkembang sebagai kekuatan industri di panggung dunia.

Studi lain yang menonjol dalam konteks reunifikasi sebagai bentuk resolusi konflik dilakukan oleh RM Berdahl. Dia meneliti tentang reunifikasi bekas Jerman Barat dan Jerman Timur dan dampaknya sebagai bentuk resolusi konflik dalam karyanya "German Reunification in Historical Perspective".⁹ Berdahl menunjukkan bahwa reunifikasi kedua bagian Jerman didukung oleh sejarah bersama yang dimiliki oleh mereka. Meskipun pada awalnya, perbedaan ideologis di antara mereka membuatnya sangat sulit untuk didamaikan, namun masyarakat luas melihat dan berpikir bahwa keduanya berbagi sejarah yang sama yang membuat reunifikasi akhirnya mungkin.

⁸ Gregory Ulferts, "North Korean Human Rights Abuses and Their Consequency", North Korean Review Journal, Detroit, 2017, hh. 36-47.

⁹ R. M. Berdahl, "German Reunification in Historical Perspective", The Journal of Berkeley and International Law, Vol.23, University of Cambridge Publishing, New York, 2006, hh. 7-9.

Setelah 1980, orang-orang dari kedua belah pihak mulai menyuarkan aspirasi reunifikasi. Mereka menganggap bahwa keadaan telah berubah, yang ditandai dengan meningkatnya interaksi di antara masyarakat dari bekas Jerman Barat dan Jerman Timur. Tanda lain dari situasi yang berubah adalah munculnya kembali masalah identitas negara yang kuat, di mana orang sekali lagi mencari orang lain dengan asal dan budaya yang sama. Cita-cita tinggi dari masyarakat ini memicu beberapa insiden gerakan sosial, seperti penyeberangan ilegal orang-orang dari bekas Jerman Timur ke bekas Jerman Barat. Satu rangkaian insiden, pada bulan Agustus 1989, menyebabkan penyelundupan sekitar 13.000 orang bekas Jerman Timur ke bekas Jerman Barat melalui Hongaria. Pada sekitar periode tersebut, beberapa daerah di bekas Jerman Timur, seperti Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thuringen, pun memilih untuk bersatu kembali dengan bekas Jerman Barat.

Berdasarkan studi-studi tersebut di atas, peran pemerintah dan rakyat sangat besar dan penting dalam menentukan apakah reunifikasi akan berhasil atau tidak. Studi-studi tersebut memiliki, sampai taraf tertentu, kemiripan dengan studi tesis ini sendiri, namun secara alami, ada beberapa perbedaan. Antara dua penelitian sebelumnya pun terdapat beberapa perbedaan, dan Tabel 1.4. di halaman-halaman berikut merangkum perbandingannya:

Tabel 1.4.
Perbandingan Penelitian

No.	Ilmuwan	Tujuan Penelitian	Teori dan Metode	Hasil
1.	G. Ulferts	Untuk memahami alasan yang mendasari penolakan Korea Utara terhadap intervensi asing dan bantuan kemanusiaan, dan juga untuk mengukur dukungan, jika ada, terhadap kemungkinan penyatuan kembali dengan Korea Selatan.	Penelitian ini menggunakan "teori ketergantungan" dan metode observasi serta data sekunder.	Studi ini menyimpulkan bahwa penolakan berasal dari kebanggaan dan kepercayaan diri ekstrem di samping kepemimpinan Kim Jong-un yang sangat kuat yang mampu mengendalikan elit politik Korea Utara dan populasi umum.
2.	RM Berdahl	Untuk memahami alasan keberhasilan reunifikasi Jerman	Penelitian ini menggunakan konsep <i>contributed severity of crash</i> dan metode observasi serta data sekunder.	Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reunifikasi Jerman sebagian besar disebabkan oleh aspirasi dan dukungan yang luar biasa dari kedua belah pihak masyarakat Jerman untuk mencapai impian bersama

				dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan akar rumput ini juga didukung oleh komunitas internasional.
--	--	--	--	---

Dari dua penelitian yang dilakukan oleh G. Ulferts dan RM Berdahl, dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara keduanya. Satu adalah subjek penelitian (yaitu bekas Jerman Barat dan Jerman Timur) dan yang lain adalah tujuan penelitian (yaitu untuk memahami alasan mengapa Korea Utara sejauh ini menolak intervensi kemanusiaan asing). Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan adalah kepemimpinan Kim Jong-un. Dia pada awalnya diharapkan, sebagai pemimpin yang sangat muda, untuk membawa cara-cara baru dan pemikiran terbuka ke sistem politik Korea Utara, dan untuk menjadi pemimpin reformis muda yang dapat secara progresif mengembangkan demokrasi dan upaya reunifikasi. Namun, harapan itu tidak terwujud.

1.5. Kerangka Teori

Untuk mendefinisikan masalah dan menyusun hipotesis, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang sudah mapan. Mereka adalah "teori realisme", "teori konstruktivisme", dan "teori kebijakan luar negeri". Ini semua dipilih karena dianggap paling efisien dan paling cocok dalam mengatasi masalah kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Kim Jong-un untuk tahun 2011 - 2017, dilihat dari perspektif Korea Utara. Selain itu, pendekatan lain yang menggunakan

"teori integrasi / unifikasi" diterapkan untuk menjelaskan kerangka kerja awal yang melingkupi tesis ini.

1.5.1. Teori Realisme

Realisme telah menjadi aspek penting dalam dinamika hubungan internasional. Mereka yang mengikuti teori klasik ini berpendapat bahwa negara adalah aktor utama yang harus dijaga setiap saat oleh pembuat kebijakan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sistem internasional masih sangat dianggap berada dalam keadaan anarki. Oleh karena itu, beberapa negara berusaha untuk menerapkan kebijakan sebagai perlawanan terhadap dinamika politik internasional, baik terhadap negara lain, organisasi internasional, atau aktor lain.

Gaetano Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat ada dua kelas populasi: Kelas mereka yang memerintah/ menguasai (*ruling class*) dan kelas mereka yang diperintah (*ruled-over class*). Kelas penguasa selalu jauh lebih kecil jumlahnya, mengatur semua fungsi politik masyarakat yang ada di dalamnya, memonopoli kekuasaan dalam masyarakat itu, dan menikmati sebagian besar manfaat yang datang dengan kekuasaan tersebut. Kelas yang diperintah jauh lebih banyak, namun dikendalikan - secara efektif atau tidak merupakan masalah lain - oleh kelas yang memerintah.

Menurut realisme, baik Korea Utara maupun Korea Selatan mengadopsi ideologi politik dan ekonomi yang saling bersaing, bahkan bertentangan. Ideologi-ideologi ini sangat kontras sehingga dapat ditempatkan pada kedua ujung ekstrem dari suatu spektrum, dan karena itu kedua Negara Korea sangat sulit untuk diintegrasikan atau disatukan kembali. Selain itu, mereka secara resmi masih berperang satu sama lain. Lebih lanjut, realisme menyatakan bahwa karena kedua negara akan mencari untuk mengeksploitasi kelemahan potensial yang ada di negara

lain, maka perlombaan senjata akan berkembang. Seperti sekarang, realisme cenderung memandang situasi sebagai terlalu materialistis, karena menganggap ideologi dan kondisi negara sebagai sesuatu yang otomatis terjadi dan dianggap sangat sulit untuk berubah.

1.5.2. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah teori yang menyatakan bahwa dunia sosial kita tidak terjadi secara alami (yaitu bahwa ia tidak diciptakan atau diberikan oleh Tuhan dalam kondisi apa adanya seperti ini), tetapi sebaliknya adalah buatan manusia. Teori sosial ini menyatakan bahwa dunia yang sebenarnya adalah hanya sebagaimana manusia, yang merupakan makhluk sosial, melihatnya. Dengan demikian, dunia itu sendiri adalah produk dari ide-ide kemanusiaan dan, dengan demikian, dapat diubah oleh transformasi manusia. Bahwa dunia tidak terpaku atau statis, namun fleksibel dan terus berubah, adalah andalan teori konstruktivisme. Ini berkaitan dengan bagaimana membuat konsep hubungan antara agen dan struktur (yang sering dianggap sebagai masalah agen-struktur).

Konstruktivis percaya bahwa negara-negara, selain harus fokus pada kekuatan material (misalnya geografi, kekuatan militer, kekayaan alam, dll.), juga menekankan pentingnya norma dan ide. Menurut konstruktivis, hanya berfokus pada kekuatan material akan membatasi negara-negara sebagai ego – atau aktor – rasional dalam mengejar kepentingan diri sendiri, yang pada gilirannya akan menghalangi mereka untuk benar-benar menyadari kepentingan pribadi mereka.¹⁰ Dengan demikian, negara direduksi menjadi tidak lebih dari entitas pasif dengan

¹⁰Emanuel Adler dan Michael Barnett (ed), "Security Communities", Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm. 12.

kepentingan yang bersifat tetap, dan bukannya sebagai entitas aktif dengan kepentingan berkembang yang mampu membentuk dan mengubah kepentingan tersebut.

Konstruktivis mengikuti struktur normatif hubungan internasional, dengan aktor dibatasi oleh struktur material dan ide kolektif yang dimiliki individu (misalnya norma, aturan, pengetahuan, dan kepercayaan). Kekuatan-kekuatan normatif ini tidak hanya membatasi aktor-aktor tersebut tetapi juga membangun identitas mereka. Ini, secara berturut-turut, akan membentuk minat mereka dan menentukan pola perilaku mereka yang sesuai di masyarakat internasional.¹¹

Peran identitas yang dibangun sangat penting dalam bidang hubungan internasional. Khususnya untuk konstruktivisme, sangat penting untuk memahami bagaimana berbagai negara bertindak. Konstruksi sosial dari realitas berarti bahwa para aktor tidak dilahirkan di luar masyarakat (internasional) dengan kepentingan tertentu, tetapi dibangun dan dibentuk oleh lingkungan sosial mereka.

Mengakui bagaimana para aktor mengembangkan kepentingan mereka sangat penting untuk menjelaskan fenomena politik internasional. Oleh karena itu, konstruktivisme dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya tersebut. Alexander Wendt dalam karyanya "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics" menyatakan bahwa:

"... identitas adalah dasar dari kepentingan."¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics", *International Organization*, Vol.46, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, hlm. 398.

1.5.3. Teori Kebijakan Luar Negeri

Teori kebijakan luar negeri - juga disebut analisis kebijakan luar negeri - adalah pengembangan teoritis dan penelitian empiris mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada kebijakan luar negeri yang digunakan oleh suatu negara. Ini adalah studi tentang manajemen hubungan eksternal yang ditindaklanjuti oleh negara, yang melibatkan tujuan, strategi, langkah-langkah, metode, pedoman, arahan, perjanjian, dan sebagainya, Teori kebijakan luar negeri melihat faktor-faktor yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh negara tertentu pada waktu tertentu. Demi singkatnya tesis ini, teori yang digunakan adalah yang langsung berkaitan dengan faktor-faktor yang mengarah pada kebijakan luar negeri itu sendiri. Ini juga bermanfaat dalam membatasi ruang lingkup masalah.

Pembuatan kebijakan luar negeri yang digunakan oleh rezim Korea Utara pada khususnya telah digambarkan sebagai suatu proses yang terdiri dari banyak keputusan yang melibatkan serangkaian keputusan interaktif. Dalam kasus Korea Utara, ini adalah proses pengambilan keputusan yang berurutan dan interaktif oleh setidaknya dua negara yang menanggapi keputusan masing-masing, yang kadang-kadang dibuat lebih kompleks dengan dimasukkannya lebih banyak negara asing yang ikut mempengaruhi keputusan. Semakin banyak kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin (atau kelompok elit pemimpin) suatu negara, semakin sedikit konsensus yang diperlukan dalam pembuatan kebijakan luar negeri.¹³

¹³ Alex Mintz dan Karl DeRouen, "Understanding Foreign Policy Decision Making", Cambridge University Press, 2012.

Dengan demikian, ada faktor-faktor yang sejauh ini berkontribusi pada kebijakan luar negeri Korea Utara. Mengenai masalah reunifikasi dengan Korea Selatan, hingga saat ini, kebijakan luar negerinya adalah bahwa syarat-syarat yang ada haruslah menguntungkan Korea Utara. Jika suatu cara yang damai tidak dapat dicapai, maka cara yang tidak damai (menggunakan kekuatan militer) dapat menjadi pilihan. Dari perspektif Korea Utara, ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal: Kemampuan defensif dan kekuatan ekstrem pemimpin Korea Utara, bersama dengan kepentingan negara-negara asing (seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang) terhadap Korea Utara.

Analisis mengapa kebijakan luar negeri Korea Utara seperti sekarang ini dapat dilakukan dengan melihat Konstitusi Korea Utara. Pasal 9 mengatakan bahwa negara itu akan bekerja untuk mencapai reunifikasi Korea, mempertahankan kedaulatan negara dan kemerdekaan politik, dan "persatuan nasional." Graham Allison mengemukakan bahwa ada tiga model perumusan kebijakan luar negeri yang masih digunakan sebagai alat analitis hingga hari ini. Allison menyatakan, bagaimanapun, bahwa tidak ada rasionalitas linear tunggal yang menentukan perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Ini berarti suatu negara cenderung menggunakan banyak model, tetapi dengan satu atau lebih dari mereka memiliki tingkat signifikansi yang lebih tinggi.¹⁴ Dalam kasus Korea Utara, ini menjadi contoh di mana kemampuan pertahanannya yang luar biasa dan kekuatan pemimpin yang luar biasa kuat adalah dua faktor paling signifikan dalam perumusan kebijakan luar negerinya, terutama dalam hal masalah reunifikasi dengan Korea Selatan.

¹⁴ Graham T. Allison, "Essence of Decision", Little, Brown and Company, Boston, 1971.

Sistem politik dalam negeri Korea Utara juga turut berkontribusi secara signifikan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Didasarkan pada ideologi Juche (kemandirian yang ekstrem), hal ini telah sangat menentukan pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya. Selain itu, struktur politik pemimpin Korea Utara telah menjadi sangat berbeda dari sistem politik sosialis lainnya, sampai-sampai sistem partai resmi hampir tidak berfungsi dalam pengambilan keputusan politik apa pun.¹⁵

Tindakan asing seperti latihan militer gabungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan reformulasi aliansi AS - Jepang juga telah menjadi pembenaran untuk perumusan kebijakan luar negeri Korea Utara. Dengan alasan bahwa pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir membenarkan peningkatan kemampuan militer yang secara langsung menjamin kebebasan dari campur tangan negara lain, Korea Utara terus menegaskan kebebasannya untuk meningkatkan keunggulan sistem pertahanannya guna mencegah kemungkinan serangan pendahuluan yang tidak diprovokasi (*pre-emptive attack*),¹⁶ Sebagaimana keadaan mereka sekarang ini, semua faktor yang sejauh ini berkontribusi pada kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan dilihat dari perspektif Korea Utara akan dijabarkan lebih lanjut dalam bab lanjutan.

¹⁵ Kei Koga, "The Anatomy of North Korea's Foreign Policy Formulation", North Korean Review: Vol. 5, McFarland & Company, Jefferson, 2009.

¹⁶ Hong Suk-hoon dan Cho Yun-young, "Consistent Patterns of DPRK's Policy on ROK: What Shapes North Korea's Foreign Policy?", Sage Publishing, Thousand Oaks, 2016.

1.5.4. Teori Reintegrasi / Reunifikasi

Seperti yang tersurat dalam istilah itu sendiri, reunifikasi adalah pengulangan unifikasi yang telah terjadi di masa lalu (yang kemudian dibatalkan oleh suatu perpecahan). Unifikasi itu sendiri tidak dapat ada tanpa fase integrasi sebelumnya. Dengan demikian, sebagian besar, jika tidak semua, teori unifikasi juga mencakup aspek integrasi. Maka salah satu teori yang paling komprehensif menjelaskan tentang integrasi / unifikasi untuk ruang lingkup penelitian ini, yaitu untuk menguji kemungkinan alasan mengapa upaya reunifikasi untuk Korea Utara dan Korea Selatan belum berhasil, adalah yang diajukan oleh Ernst Haas. Dia mendefinisikan integrasi politik sebagai proses di mana negara-negara melupakan keinginan dan kemampuan untuk melakukan kebijakan domestik penting dan luar negeri secara independen satu sama lain, dan sebaliknya mencari cara untuk membuat keputusan bersama atau untuk mendelegasikan proses pengambilan keputusan ke organ-organ sentral baru,

Negara-negara dan bangsa-bangsa yang akan diintegrasikan melakukan kompromi tertentu pada perbedaan awal mereka. Dalam hal ini, mereka terutama menyangkut kebijakan urusan internasional. Hal-hal seperti itu termasuk perdagangan luar negeri, perjanjian, kerja sama, dll.

Masalah utama lainnya termasuk kebijakan domestik penting. Ini termasuk lingkungan, hukum, mata uang, ideologi, ekonomi, dll. Oleh karena itu, dengan membuat kompromi-kompromi itu, negara-negara dan bangsa-bangsa dengan suara bulat setuju untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut dari yang sebelumnya terpisah menjadi satu unit bersama, yang diputuskan baik secara bersama-sama atau oleh badan-badan pusat yang baru didirikan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa integrasi itu sendiri adalah suatu proses. Ini harus melibatkan langkah membuat keputusan bersama.

Delegasi kegiatan dalam proses sangat penting. Perlu ada kebijakan tertentu mengenai hal ini. Akhirnya, ada organ-organ sentral baru yang akan terbentuk sebagai hasilnya.¹⁷

Setelah proses ini selesai, yang dihasilkan adalah kondisi yang terintegrasi. Kondisi ini disebut unifikasi. Jadi, unifikasi adalah keadaan di mana negara-negara yang sebelumnya terpisah, masing-masing dengan kebijakan luar negeri dan dalam negerinya sendiri, menjadi satu kesatuan negara yang sama. Kebijakan-kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang lama dan berbeda telah digabungkan ke dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang baru dan sama. Unifikasi mencakup pembentukan badan-badan penting untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan ini.

Jadi, reunifikasi adalah kondisi baru dan kontemporer untuk diintegrasikan lagi. Karena suatu negara dapat mengalami kejadian terbagi – atau dipisahkan lagi – maka setiap integrasi berikutnya dan akhirnya penyatuan disebut reintegrasi dan reunifikasi. Ini pada dasarnya adalah pengulangan proses integrasi dan kondisi reunifikasi.

1.6. Hipotesis

Melalui pendekatan analitis dari kerangka teori yang dibahas dalam sub-bab sebelumnya, suatu hipotesis dapat dibangun dengan kuat. Hipotesis ini menyatakan bahwa upaya kegagalan penyatuan kembali Korea Utara dan Korea Selatan selama kepemimpinan Kim Jong-un untuk tahun 2011 - 2017 dilihat dari perspektif Korea Utara secara signifikan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu internal (domestik) dan eksternal (internasional). Mereka adalah:

¹⁷ Ilievski, "The Concept of Political Integration", hal. 6.

- a) Pengaruh besar kondisi domestik Korea Utara, ditunjukkan oleh kepemimpinan otoriter Kim Jong-un, adopsi kuat konsep Juche, dan asumsi kemampuan militer Korea Utara sendiri. Selain itu, keberhasilan Korea Utara dalam mengembangkan persenjataannya sendiri dan pencapaiannya dalam mengekspornya juga berkontribusi pada tingkat kepercayaan diri yang dimilikinya.
- b) Pengaruh politik asing. Ini terbukti dengan bagaimana beberapa negara memposisikan diri mereka sebagai lawan Korea Utara dan keadaan di mana beberapa negara asing berusaha untuk mendorong kepentingan strategis mereka sendiri terhadap Korea Utara.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Metode Penelitian

Cassell dan Symon berpendapat bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang berupaya untuk secara akurat menggambarkan dan menafsirkan makna tanda dan indikator yang terjadi dalam konteks interaksi sosial. Metode ini semakin terkenal sejak tahun 1990-an, dan menekankan pada pengumpulan – dan analisis – dari teks tertulis dan lisan. Selain itu, metode kualitatif juga berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang situasi yang diteliti atau dipelajari.¹⁸

1.7.2. Strategi Penelitian

Salah satu dari banyak strategi penelitian yang dikembangkan dalam metode penelitian kualitatif adalah studi kasus. Studi kasus, menurut

¹⁸ Catherine Cassel dan Gillian Symon (ed), "Essential Guides to Qualitative Methods in Organizational Research", Sage Publications, London, 2004, hlm. 3-4.

Yin, adalah upaya untuk mengejar "kebenaran" ilmiah secara mendalam dalam periode waktu yang lama. Studi kasus berupaya menemukan kecenderungan, pola arah, dan interaksi berbagai faktor yang dapat mendorong atau menghambat perubahan. Studi kasus sangat bermanfaat dalam menyoroti masalah atau peristiwa tertentu secara komprehensif, bersama dengan prospek khususnya di masa depan.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan di atas, studi tesis ini dapat dikategorikan sebagai metode studi kasus interpretatif. Artinya adalah bahwa pada dasarnya, metode yang digunakan oleh tesis ini menekankan pada analisis interpretasi, bukan analisis kuantitatif, dari data yang terakumulasi. Hal ini disebabkan fakta bahwa melakukan wawancara dengan individu-individu yang terlibat sama sekali tidak dimungkinkan, penelitian ini lebih berorientasi pada tinjauan literatur, dan bahwa analisisnya mencakup serangkaian pernyataan, data mentah, asumsi dan laporan resmi dari pejabat pemerintah Korea Utara dan sumber luar, dalam kaitannya dengan perilaku pemimpin tertinggi Korea Utara selama tahun 2011 - 2017.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka untuk mengumpulkan dokumen.²⁰ Dokumen diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk teks tertulis, misalnya, artikel, buku, umpan surat kabar, dokumen resmi, dan publikasi data internet. Semua hal tersebut berkaitan dengan alasan kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan selama kepemimpinan Kim Jong-un untuk tahun 2011 – 2017 dilihat dari perspektif Korea Utara.

¹⁹ Robert K. Yin, "Case Study Research: Design and Methods. Fifth Edition", Sage Publications, London, 2014, hlm. 2 -4.

²² *Ibid.*

1.8. Lingkup Penelitian

Tesis ini dibatasi untuk menganalisis kondisi Korea Utara pada tahun 2011 - 2017. Tahun 2011 dipilih karena menandai awal pemerintahan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Adapun tahun 2017 dipilih karena merupakan masa terakhir dengan sumber data yang dapat diandalkan ketika Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un masih berada di dalam perspektif memiliki faktor-faktor yang sangat unggul dalam masalah reunifikasi dengan Korea Selatan.

1.9. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I adalah bagian pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, rumusan masalah, kerangka teori, strategi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah latar belakang historis dari konflik Korea dan bagaimana hal itu sampai pada kondisinya saat ini.

BAB III adalah bagian tentang hubungan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, bab ini juga membahas tentang deskripsi ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, dan kepemimpinan Korea Utara.

BAB IV membahas tentang kegagalan reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan selama kepemimpinan Kim Jong-un untuk tahun 2011 - 2017 dilihat dari perspektif Korea Utara, yang disebabkan oleh kondisi domestik dan politik internasional.

BAB V terdiri dari kesimpulan dari pengolahan dan analisis data.